

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah peneliti deskripsikan pada Bab IV, dapat disimpulkan bahwa:

1. Proses komunikasi organisasi internal yang dilakukan oleh YPKP 65 Sumatera Barat dipengaruhi oleh jenjang hierarkis yang terdapat pada YPKP 65 Sumatera Barat. Informasi mengenai kegiatan yang dilakukan oleh YPKP 65 terkait pelanggaran HAM berat peristiwa 1965/1966 bersumber dari koordinasi dan instruksi yang diberikan oleh pimpinan. Keberadaan perwakilan cabang di beberapa kabupaten dan kota memudahkan YPKP 65 Sumatera Barat dalam melakukan kegiatan yang berkaitan dengan pelanggaran HAM berat peristiwa 1965/1966. Komunikasi organisasi internal YPKP 65 Sumatera Barat sudah terlaksana dengan cukup baik meskipun keberadaan YPKP 65 Sumatera Barat itu sendiri pernah mengalami peristiwa pembubaran pada saat melakukan diskusi.
2. Proses komunikasi organisasi eksternal yang dilakukan oleh YPKP 65 Sumatera Barat dengan korban pelanggaran HAM berat peristiwa 1965/1966 memberi pengaruh pada perkembangan organisasi. Para korban berperan sebagai relawan yang mendukung pelaksanaan



kegiatan terkait pelanggaran HAM berat peristiwa 1965/1966. Selain itu, komunikasi organisasi eksternal YPKP 65 juga dilakukan dengan bekerjasama dengan lembaga-lembaga terkait seperti Komnas HAM dan LPSK.

5.2 Saran

1. Bagi YPKP 65 Sumatera Barat perlu adanya regenerasi yang dilakukan di dalam kepengurusan sehingga kegiatan YPKP 65 Sumatera Barat terkait pelanggaran HAM berat peristiwa 1965/1966 dapat terlaksana lebih maksimal.
2. Masyarakat sebaiknya tidak lagi memiliki prasangka pada kegiatan yang dilakukan oleh kelompok yang memiliki perhatian dalam pengungkapan fakta peristiwa 1965/1966. Peristiwa 1965/1966 merupakan cacatan kelam bagi bangsa Indonesia sehingga perlu adanya penelusuran sejarah lebih lanjut yang dapat dijadikan pelajaran agar tidak terjadinya peristiwa yang serupa.
3. Pemerintah sebaiknya memberikan kejelasan kepada korban pelanggaran HAM berat peristiwa 1965/1966 berupa penggantian terhadap kerugian yang mereka alami. Bagaimanapun, pemerintah harus menjamin setiap hak-hak bagi warga negaranya.

